PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015)

OLEH
WIRANATA SARAGIH
Program Studi Akunatansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: saragihwiranata@gmail.com

ABSTRACT

Tax income target are the problem for national income. This research have aims to examine the influence of ownership tax ID and tax audit to tax income.

The method used is descriptive analysis and verification. The analysis method used is multiple linear regression analysis. Sample in this research use census method and the result is ownership tax ID, tax audit and tax income in Small Tax Payers Majalaya 2011-2015.

The results in this study indicate that ownership tax ID have positive effect to tax income and tax audit have positive effect to tax income in Small Tax Payers Majalaya.

Keywords: Ownership Tax ID, Tax Audit, Tax Income

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak dapat memanfaatkan berbagai potensi itu. Dapat dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Casavera, 2009:4).

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolomkolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

1.2 Identifikasi Masalah

Indentifikasi masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah:

1) Masih banyaknya wajib pajak yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Kurang opltimalnya kinerja Pemeriksa Pajak yang mengakibatkan rendahnya setoran Pajak .

3) Rendahnya Penerimaan pajak sehinggah tidak Mencapai target Penerimaan Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Seberapa besar Pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak?

2) Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Menurut Azuar dkk (2014:105) manfaat penelitian adalah subbab dimana penelitian mengemukakan manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi guna mengetahui Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Azuar dkk (2014:104) tujuan penelitian adalah hal-hal objektif apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh peneliti, berkaitan dengan hal-hal yang dipertanyakan pada rumusan masalah. Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak.

2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan bagi pihak–pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini, serta bagi Jurusan Akuntansi itu sendiri.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang serta untuk mengetahui bagaimana caranya agar tercapainya target penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca sebagai wawasan baru dan pengetahuan baru ataupun tambahan ilmu pengetahuan dari minimal menjadi maksimal agar lebih paham khususnya dalam hal Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.1.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Casavera (2009) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam adminstrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan adminstrasi perpajakan. Oleh karena itu, NPWP dapat digumakan untuk mengetahui atau mengawasi wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

2.1.1.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
   (a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
   (b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
   (c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
   (d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
   (e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka: Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
   (a) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
   (b) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
   (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
   (d) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
   (e) Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
   (f) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
   (g) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Sedangkan penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

   Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksankan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.
2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.

   Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat

   Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat di perolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *Operating Arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.
4) Pelayanan

   Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5) Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Agus Setiawan (2007:157) sebagai berikut:

"Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Berbagai penelitian mengenai kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak telah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Budi Sutrisno (2016) dengan judul pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang) menyatakan bahwa Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian juga telah dilakukan oleh Desty Fitria Amanah (2014) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pengusaha (studi KPP pratama malang selatan) menyatakan bahwa hasil penelitiannya Variabel kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap penerimaan PPh op pengusaha.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) Sebagai berikut :

"Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak."

Menurut Erly Suandy (2011:101) sebagai berikut :

"Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance, melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasionalisasi Variabel atau operasional suatu variabel menurut Sugiyono (2010:38) sebagai berikut:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya."

1) Variabel Bebas / Independent (Variabel X1 dan X2)

Definisi Variabel Bebas menurut Sugiyono (2010: 33) adalah sebagai berikut:

"Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen)".

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepemilikan NPWP (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2).

2) Variabel Terikat / Dependent (Variabel Y)

Definisi Variabel Terikat menurut Sugiyono (2010:39) adalah sebagai berikut:

"Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Adapun variabel terikat atau variable dependen pada penelitian ini adalah penerimaan pajak yaitu sebagai variable Y. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio, berikut ini pengertian mengenai rasio:

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010:137), mengatakan bahwa:

> "Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen."

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Sebelum menentukan penentuan data yang akan dijadikan sampel, terlebih dahulu dikemukakan tentang populasi dan sampel. Pengertian Populasi menurut Sugiyono (2013:49) adalah sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah kepemilikan NPWP wajib pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Jumlah penerimaan yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Majalaya pada periode tahuh 1983-2015.

3.4.2 Penarikan Sampel .

Menurut Sugiyono (2014:118), sampel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> "*Sampel* adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut."

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Jumlah kepemilikan NPWP,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Jumlah penerimaan yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Majalaya pada periode tahuh 2011-2015.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya yang beralamat di Jl.Peta N0. 7 Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung keperluan penganalisaan data penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang besar dari dalam maupun luar perusahaan. Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:62), didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data".

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

   1. Survei

   Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung pada kantor pelayanan pajak pratama Soreang untuk mendapatkan data yang diperlukan.

   2. Dokumentasi

   bersamaan dengan survey tersebut pengumpulan data yang dibutuhkan atau dengan cara mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang dimiliki instansi.

2) Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Penelitian kepustakaan ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, buku, hasil penelitian yang sejenis dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.

3.6 Metode Pengujian Data

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif.

Definisi Metode Analisis Kuantitatif menurut Sugiyono (2010:8) adalah sebagai berikut :

> "Metode analisis kuantitatif dapat diartikan sebagai metode analisis yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik. Penyajian analisis data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Adapun langkah-langkah analisis verifikatif (kuantitatif) yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi:

(a) Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2002:393), dasar pengambilan keputusan bias dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah normal.
b) Jika probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan:

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

(b) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

a) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.

b) Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

(c) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-*Rank Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). Sedangkan jika kondisinya nilai Sig. *correlations spearman's*> alpha (tingkat ketelitian=5%), maka tidak terjadinya heteroskedastisitas (Gujarati Damodar , 2003: 406).

(d) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182), uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antar anggota sampel. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW).

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Definisi Garis Regresi menurut Andi Supangat (2007:352) adalah sebagai berikut:

> "Garis regresi (*regression line*/*line of the best fit*/*estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)".

Analisis ini digunakan dengan melibatkan variable dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a+b_1X_1+B_2X_2$$

Sumber : (Andi Supangat,2007:352)

Dimana:

Y = variabel terikat (Penerimaan Pajak)

a = bilangan berkonstanta

b1,b2 = koefisien arah garis
X1 = variabel bebas X1 (Kepemilikan NPWP)
X2 = variabel bebas X2 (Pemeriksaan Pajak)

1) Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Pearson dengan Rumus:

$$r = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi \sum y)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n(\sum yi^2) - (\sum yi)^2\}}}$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:50)

Dimana :
r = Koefisien Korelasi
n = Jumlah Responden
X = Varaiabel Independen (Kepemilikan NPWP/Pemeriksaan Pajak)
Y = Variabel Dependen (penerimaan pajak)
Besarnya koefisien korelasi adalah -1< r < 1:
a) Apabila – berarti terdapat hubungan negatif
b) Apabila + berarti terdapat hubungan positif
Interprestasi dari nilai koefisien korelasi adalah :
1) Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan anatara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yeng berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya)
2) Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungannya kuat antara variabel X dan Y dan hubungan serah.

2) Koefisien Determinasi

Menurut Andi Supangat Supangat (2007:350), mengemukakan bahwa:

”Koefisiensi determinasi (R^2) merupakan besaran untuk menunjukkantingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentukpersen (menunjukkan seberapa besar presentase keragaman y yang dapatdijelaskanoleh keragaman x), atau dengan kata lain seberapa besar x dapatmemberikan kontribusi terhadap y”.

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (R)^2 \times 100\%$$

Sumber :Umi Narimawati (2007:89)

Dimana :
Kd = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X
R^2 = Kuadrat koefisien korelasi

3) Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1 Gambaran Kepemilikan NPWP Periode Tahun 2011 – 2015

Kondisi kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2011-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 5 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 8.838.42, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2011 sebasar 6.435.25. Kemudian untuk perkembangan kepemilikan NPWP, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2015 sebesar 11%, dan penurunan terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 9%.

4.2.2 Gambaran Pemeriksaan Pajak Periode Tahun 2011-2015

Kondisi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2011-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 5 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 44.5, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2011 sebasar 23.5. Kemudian untuk perkembangan Penagihan Pajak, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2014 sebesar 29%,dan penurunan terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 8%.

4.2.3 Gambaran Penerimaan Pajak Periode Tahun 2011-2015

Kondisi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2011-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 5 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 36,515,575,793, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2013 sebasar 19,643,473,769 . Kemudian untuk perkembangan Penerimaan Pajak, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2015 sebesar 25% dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 11%.

4.3.2. Analisis Verifikatif

4.3.2.1.Hasil Uji Asumsi Klasik

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah regresi linier berganda.

4.3.2.1.1. Uji Normalitas

Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan uji normalitas, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,219 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

4.3.2.1.2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil nilai VIF yang telah diuji pakai spss, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan dimana variabel jumlah kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak mempunyai *tolerance* yang sama yaitu sebesar 0.926 dan nilai VIF sebesar 1.080 pula.,Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas artinya variabel X tidak memiliki korelasi yang kuat.

4.3.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi yang artinya tidak ada data yang berulang dan bervariasi sehingga tidak ada data yang monoton, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.3.2.1.4. Uji Autokorelasi

Nilai dU yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian ini diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan jumlah data observasi 36 dan 2 variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.3.2.1.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang menjelaskan dari pengaruh kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$Y=-3.063E10+7.602E6X_1+ 5.327E6X_2$

4.3.2.1.6. Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di KPP Majalaya

1. Koefisien Korelasi

Dapat dilihat koefisien korelasi (nilai r) yang diperoleh adalah sebesar 0,793 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara

0,60-0,799. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya kepemilikan NPWP, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan yang kuat antara kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

Dapat dilihat bahwa kepemilikan NPWP memberikan kontribusi sebesar 73,1% terhadap penerimaan pajak, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain.

4.3.2.1.7 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Majalaya

1. Koefisien Korelasi

Dapat dilihat koefisien korelasi (nilai r) yang diperoleh adalah sebesar 0,226 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat dikarenakan berada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya KPP melakukan pemeriksaan pajak kepada wajip pajak yang terutang, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

Dapat dilihat bahwa pemeriksaan pajak memberikan kontribusi sebesar 42,5% terhadap penerimaan pajak. sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain.

4.4 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak.

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan pajak yaitu sebesar 0,792 yang tergolong dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,60-0,799. Hubungannya menunjukkan arah positif dengan nilai r 0,780 artinya, setiap kenaikan kepemilikan NPWP maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak kondisi ini menunjukkan hasil penelitian yang inoudilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Bambang Brodjonegoro (2016:79), yang menyatakan bahwa Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada

wajib pajak (WP) orang pribadi. Selanjutnya besar persentase pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 73,1%, artinya sebesar 73,1% penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian di atas telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi, Dimana masih memungkinkan adanya terjadi fenomena ketika kepemilikan NPWP tinggi dan penerimaan pajak rendah. Karena pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak hanya 73,1 % artinya penerimaan pajak tidak 100% dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP dan masih ada 26,9% variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak diteliti, jadi ketika fenomena terjadi sangat dimungkinkan karena ada 26,9% variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP yang cukup besar. Adapun fenomena kepemilikan NPWP menurut Direktur Jendral Pajak (Ditjen) Fuad Rachmany (14 Januari 2014) "masih banyak wajib pajak orang pribadi belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga Ditjen pajak kesulitan melacak keberadaan wajib pajak orang pribadi yang di luar karyawan. Jadi, dalam kepemilikan NPWP, Direktorat Jendral Pajak dapat mengetahui atau mengawasi wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit (2011), Desty Fitria Amanah (2014) sama-sama menyatakan bahwa kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan Bambang Brodjonegoro (2016 :79) bahwa Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi. Dan teori dari Agus Setiawan (2007:157) bahwa Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan sebaiknya KPP lebih bekerja keras lagi dalam menjaring wajib pajak yang belom memiliki NPWP dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat sadar bahwa pajak adalah salah satu modal negara dalam menjalankan dan membangun negara ini, sehinggah menjadi negara yang sukses dan maju.

4.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis korelasi (r), menunjukkan bahwa hubungan yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0.226, dimana nilai korelasi terdapat hubungan yang rendah dan positif. Nilai korelasi yang positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel pemeriksaan pajak dan harga saham adalah searah. Artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) menyatakan bahwa Tujuan kebijakan

Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Kemudian menurut Erly Suandy (2011:101) Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance,* melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pemeriksaan Pajak (X_2) menunjukan nilai nilai t_{hitung} (3.133) > $-t_{tabel}$ (-2.00247) dan t_{tabel} (2.00247) sehingga Ho ditolak. Artinya Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Majalaya periode 2011-2015 dengan nilai determinasi 42.5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan pengaruh yang positif Penerimaan Pajak Penghasialn Badan oleh Pemeriksaan pajak.

Adapun hasil dari analisis koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak adalah 42.5%, sedangkan sisanya 57.5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi, kepatuhan pajak, penagihan pajak, dan lain-lain. Hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi bahwa pada kenyataannya pemeriksaan pajak memiliki masalah yaitu menurunnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurun pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kurang maksimalnya penerapan teknologi informasi. Sehingga terbukti bahwa pemeriksaan pajak yang bermasalah mempengaruhi penerimaan pajak yang bermasalah. Untuk itu maka disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan lebih menerapkan teknologi informasi untuk perbaikan pemeriksaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015, yang artinya setiap penambahan NPWP akan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak.

2. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015 . yang artinya Semakin seringnya penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP akan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus setiawan.2007. Tax Audit dan Tax Review. Jakarta. Pt. Raja Drafindo.

Andi Supangat. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Casavera. *"Perpajakan",* Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Diana Sari.2013. Konsep Dasar Perpajakan. Pt Refika Aditama

Dr.A.Fuad Rahmany, M.A. 2011. Buku Panduan Sensus Pajak Nasional; Direktorat Jenderal Pajak

Edi Slamet Irianto. 2015. *10 Tahun Berkinerja Buruk, Ditjen Pajak Mulai Agresif Audit.*

Erly Suandy, 2011. Edisi 5. *Perencanaa Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Fuad Rahmany. 2014. Penerimaan Pajak 2014 Tak Capai Target. Diakses Pada Jurnal Asia , minggu 13 Maret 2016.

Fikri Faqih.2015.Target penerimaan pajak 2016 dinilai tak realistis. Diakses Pada, Minggu Maret 2016.

Fitriyani, Dewi dan Wiwik Tiswiyanti. *"Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi",* Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol.1, No.1, 2009.

Fouktone*."Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak"*. 2007.

Gujarati, Damodar, 2003. *Ekonomi Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Listyaningtyas, Ellya Florentin. *"Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung"*, Surabaya, 2012.

Mardiasmo. 2009*. Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset

Mashuri.2008. Penelitian Verifikatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi

Purba, Arifanda. *"Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah",* Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.

Resmi, Siti. "Perpajakan: Teori dan Kasus", Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta,2009.

Salip dan Tendy Wato. *"Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk)"*, Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.2, September 2006.

Setiawan, Deddy Arief. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)", Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.7, No.1,April 2007.

Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua*. Jakarta : Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia "Konsep Aspek Formal".*Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori Dan Teknis Perhitungan.* Jakarta: Graha Ilmu

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif.* Salemba Empat :Jakarta.

Sukirman. *"Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak"*,Analisis Manajemen, Vol.5, No.1, Juli 2011.

Sugiyono. "*Metode Penelitian Bisnis*", Cetakan ke-13, Alfabeta cv, Bandung, 2009.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung : Alfabeta

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.* Melalui

Tansuria, Billy Ivan. *"Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)"*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Umar, Husein. "Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan)", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

_____ . 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat